

Media Online	Tribun Timur
Tanggal	Jumat, 18 April 2025
Wilayah	Kabupaten Luwu



3 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Luwu Kembalikan Kerugian Negara Rp368 Juta



TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Sulawesi Selatan menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp368.979.000 dari tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Luwu tahun 2022.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Luwu, Rama Hadi menjelaskan, nilai kerugian negara tersebut berdasarkan hasil gelar perkara tim penyidik serta Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. "Pengembalian kerugian negara dilakukan langsung oleh para tersangka kepada tim penyidik, Rabu kemarin dan saat ini dana tersebut dititipkan sementara di brankas Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Luwu," ujar Rama, Jumat (18/4/2025). Adapun tiga tersangka dalam kasus ini yakni ialah Ketua KONI Kabupaten Luwu, ARM, Bendahara berinisial SS dan Sekretaris berinisial A. Kata Rama, ketiga tersangka diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu tahun 2022.

Perbedaan antara laporan dan penggunaan anggaran di lapangan mengakibatkan kerugian keuangan negara. "Dari hasil penyidikan, telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka," jelas Rama. Ia menambahkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Subsider, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama.

Menurut Rama, Kejaksaan berharap pengembalian kerugian negara ini menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. "Selain itu, hal ini diharapkan memberikan efek jera serta mendorong peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.